



Dewan Minta Uang Saku Perdin Dinaikkan

YOGYAKARTA – Anggota DPRD Kota Yogyakarta minta jatah uang saku perjalanan dinas (perdin) tahun ini dinaikkan. Usulan disampaikan oleh pimpinan Dewan saat rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), kemarin.

Ketua DPRD Kota Yogyakarta Sujanarko mengatakan bahwa usulan menaikkan uang saku didasarkan pada perbandingan dengan uang saku perdin anggota Dewan di empat kabupa-

ten lain di DIY. Sebab, meskipun sejak triwulan terakhir 2016 uang saku sudah naik dua kali lipat menjadi rata-rata Rp1 juta per hari, namun nominalnya masih di bawah kabupaten lain.

"Keinginan kami hanya ingin menyesuaikan angkanya dengan kabupaten lain. Apalagi Kota Yogyakarta kan ibu kota provinsi," katanya.

Sujanarko optimistis usulan tersebut akan disetujui eksekutif karena hanya merevisi beberapa komponen perdin yang sudah dianggarkan tanpa mengubah pagu anggaran secara keseluruhan. Apalagi, usulan sebatas untuk kegiatan kalangan legislatif saja.

Nominal yang diajukan di-

akuinya sama dengan Kabupaten Sleman, yaitu Rp1,7 juta per hari. "Tapi kami tidak serta merta *gedekke omahe dewe*. Karena kami dulu menaikkan bareng-bareng dengan eksekutif, sedangkan kabupaten lain tidak. Usulan ini juga masih di bawah provinsi yang sebesar Rp1,75 juta," katanya.

Sekretaris TAPD Yogyakarta Kadri Renggono mengaku akan mengkaji lebih dulu usulan tersebut. Menurutnya, usulan bisa diakomodir asalkan tidak me-

ngubah pagu anggaran dan sesuai dengan aturan Pemda DIY melalui Peraturan Gubernur tentang Standar Harga barang dan Jasa (SHBJ).

Jika disepakati, maka sumber dana untuk mengakomodir usulan Dewan itu kemungkinan akan diambilkan dari pengurangan biaya penginapan hotel. "Tapi ini masih akan dipelajari dulu. Karena kita sudah ada Perwal No 110/2016 yang mengatur SHBJ dan di dalamnya juga ada pengaturan komponen

uang saku dan hotel," katanya.

Diketahui, perjalanan dinas anggota Dewan di antaranya meliputi perjalanan dinas tiap Komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi, Badan Kehormatan, Panitia Khusus (Pansus) yang mencapai 30 Pansus, bimbingan teknis, reses, pertemuan Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia (Adeksi), serta fungsi pendampingan pejabat eksekutif. Badan APBD 2017 untuk membiayai seluruh kegiatan tersebut

mencapai Rp26,8 miliar.

Di sisi lain, Sekretariat Dewan Kota Yogyakarta mencatat hari kerja pada 2017 yang banyak tersedot untuk agenda perdin. Berdasar penghitungan masa kerja, sepanjang tahun ini ada 245 hari kerja efektif. Khusus masa kerja DPRD Kota Yogyakarta, dari jumlah tersebut hanya tersisa rata-rata 70 hari kerja di kantor karena 175 hari sisanya habis untuk agenda perjalanan dinas.

ristu hanafi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005